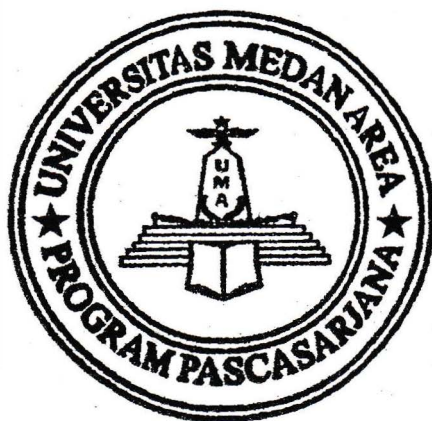


PERAN SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

(Studi Kasus Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu)

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Administrasi Publik



Diajukan Oleh :

H. PONTAS HARAHAHAP S.Sos
NPM. 051801007

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

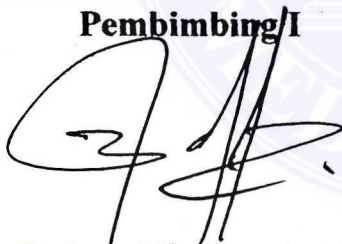
**Judul : Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan
Peraturan Daerah (Studi Kasus Kinerja Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu)**

N a m a : Pontas Harahap

N I M : 051801007

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Badaruddin Rangkuti, MSi

Pembimbing II



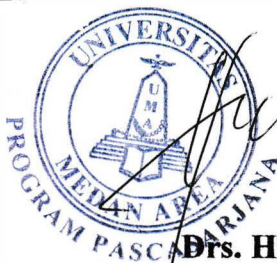
Drs. Burhanuddin Harahap, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



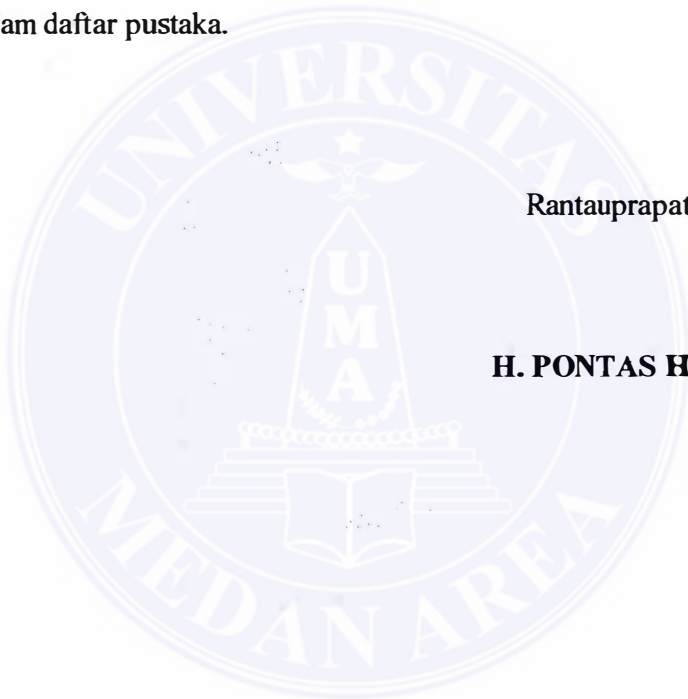
Drs. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Rantauprapat. Juni 2007

H. PONTAS HARAHAP S.Sos



(Motto)

*Katakan Putih, Jika Putih...
Katakan Hitam, Jika Hitam...*

(H. Pontas Harahap)



Kupersembahkan Untuk :

*Keluarga Tercinta...
Terima Kasih Atas Do'a,
Kesabaran, Pengorbanan Besar
Serta Cinta Dan Kasih Sayang Yang Tulus...*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“PERAN SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH”** (Studi Kasus Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu) sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada Program Pasca Sarjana S-2 Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Pencarian status tidak sesulit mencari jalan untuk menegaskan sebuah status, itu yang penulis rasakan selama menjalani studi, penulis mengalami banyak cobaan bahkan yang sifatnya drastis sekalipun. Namun keadaan tersebut, membuat penulis mengerti akan makna sebuah perjuangan, takdir dan do'a serta semakin memahami arti dalam hidup dan kehidupan ini. Penulis menyadari sepenuhnya, begitu banyak pihak yang membantu, memfasilitasi dan mengakomodasikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjalani pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Bapak Pengelola, Bapak/Ibu Dosen Pengajar, seluruh staf dan karyawan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, bantuan, fasilitas dan ilmu serta wawasan di Kampus MAP-Medan Area tercinta ini.
3. Bapak Dr. Badaruddin Rangkuti, M.Si, selaku Pembimbing I, atas segala arahan, masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kesungguhan selama penulis menyusun tesis ini serta Bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku Pembimbing II, atas ide cemerlang, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Drs. Kariono, MA dan Bapak Drs. Usman Tarigan, M.Si selaku Penguji, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan tidak terhingga untuk masukan dan koreksinya demi penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. Keluarga tercinta, terima kasih atas do'a, kesabaran, pengorbanan yang besar serta cinta dan kasih sayang yang luar biasa tulus sehingga Penulis dapat berhasil menyelesaikan pendidikan ini.
6. Saudara Drs. Edi Sampurna Rambe, M.Si, terima kasih atas segala masukan dan dukungan motivasi yang diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan studi.
7. Tak lupa rekan-rekan di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Labuhanbatu dan di seluruh Indonesia, selamat bertugas. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Labuhanbatu yang pernah merasa terintimidasi baik melalui tindakan maupun ucapan selama penulis bertugas.

Penulis menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang belum disebutkan disini yang telah membantu baik materi maupun non materi selama melaksanakan studi di Yogyakarta. Semoga Allah SWT. membalas semua do'a, kesabaran, dorongan serta amal dan kebaikan yang telah diberikan menjadi ibadah dan kemudian mendapat ridha-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna. Kiranya ini merupakan cerminan bahwa penulis harus lebih banyak dan giat lagi belajar. Untuk itu segala sumbang saran dan kritik yang ditujukan demi perbaikan tesis ini akan penulis terima dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih yang tulus. Dan akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalam...

Rantauprapat, Juni 2007

Penulis

INTISARI

PERAN SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

(Studi Kasus Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Labuhanbatu)

Dalam pelaksanaan tugasnya, secara kasat mata dapat dilihat bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang berat dalam pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan daerah, sebab pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan daerah merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan diterbitkannya peraturan perundangan daerah. Oleh karena itu pelaksanaan peraturan perundangan daerah merupakan hal mutlak yang harus ditegakkan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat memberikan kontribusi besar kepada daerah.

Atas dasar tersebut, maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi kewenangan untuk menangani pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan daerah, perlu berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk melaksanakan visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu, diperlukan sumber daya yang benar –benar berdaya guna baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan atau anggaran. Aspek sumber daya yang tersedia dalam organisasi merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun dalam kenyataannya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala antara lain kurangnya kesiapan personil dalam hal kedisiplinan dan kemampuan, sarana dan prasarana pendukung personil dalam melaksanakan tugas, kurang memadainya pembiayaan atau anggaran dana operasional dari pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan, serta sistem koordinasi antar instansi di pemerintah daerah yang sangat vital dirasakan masih sangat kurang, sehingga terkesan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan sendirian dalam melaksanakan tugas, tak jarang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berbenturan dengan instansi lainnya, dan tak jarang instansi tersebut gerah karena merasa terlalu dicampuri urusannya. Padahal Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah berlangsung di 22 kecamatan seluruh Kabupaten Labuhanbatu, dan itu berarti terhambatnya pelayanan terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat yang notabene merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Kata Kunci : *Visi Misi Organisasi, Proses, Hasil.*

3. Sumber Daya Manusia.....	
1. Struktur Organisasi.....	
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.....	
E. Kerangka Pemikiran.....	
F. Tinjauan Pustaka.....	
G. Sistematika Penulisan.....	

B/V/B II MEKYACKY LEONI

BAB II KERANGKA TEORI

B. Pengukuran Tentang Kinerja Organisasi	13
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.....	20
1. Struktur Organisasi.....	27
2. Sumber Daya Manusia.....	36
3. Anggaran atau Finansial.....	36
D. Definisi Konseptual dan Operasional.....	40
1. Definisi Konseptual.....	41
2. Definisi Operasional.....	41
E. Kerangka Pemikiran.....	43
F. Tinjauan Pustaka.....	44
G. Sistematika Penulisan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Paradigma Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Sifat Penelitian.....	49
D. Desain Penelitian.....	50
E. Teknik pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	58

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Intisari.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel dan Gambar	x
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penulisan	10
1. Tujuan Akademis	10
2. Tujuan Praktis	10
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Konsep Organisasi Dan Kinerja Organisasi.....	13
B. Pengukuran Tentang Kinerja Organisasi.....	16
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.....	20
1. Struktur Organisasi.....	27
2. Sumber Daya Manusia.....	36
3. Anggaran atau Finansial.....	39
D. Definsi Konseptual dan Operasional.....	40
1. Definis Konseptual.....	41
2. Definis Operasional.....	41
E. Kerangka Pemikiran.....	43
F. Tinjauan Pustaka.....	44
G. Sistematika Penulisan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Paradigma Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Sifat Penelitian.....	49
D. Desain Penelitian	50
E. Teknik pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	56
G. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	58

BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	59
	A. Kondisi Geografis.....	59
	B. Keadaan Penduduk.....	61
	C. Keadaan Organisasi.....	62
	D. Organisasi Polisi Pamong Praja.....	63
	1. Sejarah Pembentukan Polisi Pamong Praja	63
	2. Organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.....	68
BAB V	ANALISA DAN PEMBAHASAN	72
	A. Efektifitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.....	73
	B. Kualitas Layanan.....	77
	C. Responsivitas.....	81
	D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu	84
	1. Struktur Organisasi	84
	2. Sumber Daya Manusia	92
	3. Anggaran atau Finansial.....	99
	E. Interpretasi antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran atau finansial dengan Pencapaian kinerja Penegakan Peraturan Daerah oleh Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu	103
BAB VI	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran-saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
<i>Gambar 2.1</i>	Variabel Pengaruh dan Variabel Terpengaruh	44
<i>Gambar 4.1</i>	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Labuhanbatu.....	60
<i>Gambar 4.2</i>	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.....	71
 <i>Tabel</i>		
<i>Tabel 4.1</i>	Keadaan Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu....	61
<i>Tabel 5.1</i>	Latar Belakang Pendidikan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu ahun 2007	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah di Indonesia telah memasuki fase yang benar-benar baru dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dimana Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Pemberlakuan Undang-undang tersebut menciptakan format baru bagi kebijakan otonomi daerah, sehingga menjadi titik awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Jika pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (*developmentalism*), kemudian pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), maka, dimasa kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan berkewajiban menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (*plusentris*) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (*sentral*) menuju lokus-lokus daerah (*desentral*) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (*society*).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham teknokrasi

yang masih terus kita rasakan sekarang ini. Sebuah pemerintahan yang membuat konsep otonomi daerah sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara sebagai mesin pembangunan tersebut (pembangunan oleh negara). Dengan satu tawaran paradigma baru, maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam PAD), tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi swasta (tercermin dalam PDRB), penegakan asas *good governance*, (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Salah satu konsekuensi positif yang muncul dari pelaksanaan penerapan otonomi daerah tersebut adalah kewenangan pemerintah daerah menciptakan perangkat sesuai kebutuhan pada sistem pemerintah daerah, dan mengkondisikan suasana yang mendukung dalam pelaksanaan kerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Tindak lanjutnya adalah dituntutnya kinerja optimal dari masing-masing instansi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam kebijakan otonomi daerah yang menuntut gerak cepat dalam pelayanan publik.

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan in-efisiensi (Dwiyanto,1995). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Abdullah, Irwan, 2002, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Administrasi*, MAP UGM, Yogyakarta.
- Amstrong, Michael, 1988, *Menjadi Manajer yang lebih baik lagi*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Ancok, Djamaluddin, 2001, *Manajemen Sumber daya manusia* (MAP 532).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2003, *Labuhanbatu Dalam Angka*.
- Bernadin, H. John & Joyce, E.A. Russell, *Human Resource Management*, Mc Grow-Hill, inc., Singapura, 1993.
- Bryson, John M, (Penerjemah M. Miftahudin), 1999, *perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Effendi, Sofian, 2002, *Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Esman, Milton, J, 1989, *The Element of Institution Building*, Ithaca: Cornell University Press.
- Etzioni, Amitai, 1969, *Organisasi-Organisasi Modern*, terjemahan Suryatim, UI Press, Jakarta.
- Flippo, Edwin B, 1987, *Manajemen Personalia*, edisi keenam, Erlangga Jakarta.
- Gie, The Liang. 1974, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Goggin, Malcolm L., et al, 1990, *Implementation Theory and Practice : Tward a third generation*, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.
- Hasibuan, Malayu SP, 1984, *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP, 1996, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Bandung.
- Hasibuan, Malayu SP, 1980, *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Henry, Nicholas, 1988, *Administrasi Negara, Masalah-masalah Kenegaraan*, Rajawali press, Jakarta.
- Jackson, J.H, Morgan, CP, dan Paolillo, J, 1978, *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, U.S.A.
- Joedono, S.B, 1974, *Administrasi Pembangunan, sebuah pengantar*, Prisma No.4,4.

- Jones, Gareth R, 1995, *Organizational Theory : Text and Cases* Addison Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.
- Jones, Gareth R. 1991, *Organizational Theory, Text and Cases*. USA. Wesley Publishing Company, Reading Massachusetts.
- Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi daerah di Negara RI*, Rajawali Pers.
- Keban, T. Yeremias, 1995, *Kinerja Organisasi Publik*, Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sedyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias, 1998, *Cara Pengukuran Variabel Penelitian*, UGM Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Batam.
- Moleong, Lexy, J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S., 2003, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh., 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1992, *Pengembangan Sumber daya Manusia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Numberi, Freddy, 2000, *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Bahan Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Yogyakarta.
- Salusu, J, 1996, *Mpengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit*, Pt. Grasindo, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 1995, *Analisa serta perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Simamora, Henry, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, SKPN, Yogyakarta.
- Soerjadi, FX, 1993. *Organization and Methods*, PT.Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Steers Richard. M.. 1985, *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Suradinata, Ermaya, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Ramadhan Bandung.

Thoha, Miftah, 2001, *Prilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yin, Robert K., 2002, *Studi Kasus (Case Study)*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainum, Buchari, 1989, *Manajemen dan Motivasi*, Edisi Revisi, , Balai Aksara.

Peraturan-peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Peraturan Bupati labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2006 Tanggal 2 Maret 2006 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban

Rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Labuhanbatu Tahun 2006

Sumber Lain-lain :

Surat Kabar Harian Waspada, terbitan tanggal 17 Maret 2007, halaman 5.